

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Independensi Kopolnas tidak disebutkan secara tertulis dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kopolnas, namun demikian bila dilihat dari hubungan hierarkis, pola rekrutmen, kinerja dan pertanggung jawabannya, maka Kopolnas masih relevan untuk disebut sebagai lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Berbagai faktor yang mendukung independensi Kopolnas seperti Asas Organisasi dan Peraturan Kopolnas, Komposisi anggota Kopolnas dan juga Sistem pengambilan keputusan Kopolnas makin memperkuat independensi Kopolnas dimana kemudian dapat menutupi kelemahan-kelemahan yang menjadi faktor penghambat independensi Kopolnas seperti Faktor Normatif, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Kopolnas, dan Kesekretariatan Kopolnas.

#### **B. Saran**

Sekalipun Kopolnas terbukti sebagai suatu badan yang independen, alangkah baiknya jika Pemerintah lebih memperkuat kedudukan dan jaminan bagi Komisi Kepolisian, karena eksistensi dari Komisi Kepolisian yang ditopang oleh Peraturan

Presiden (Perpres), dapat diartikan bahwa setiap saat komisi ini bisa saja dibubarkan oleh Presiden tanpa meminta persetujuan lebih lanjut dari lembaga negara manapun termasuk DPR bila Presiden menganggap lembaga ini tidak lagi diperlukan.

Komposisi anggota Kompolnas perlu dirombak dengan mengisi seluruh kursi dari kalangan orang-orang yang independen, bukan dari kabinet Presiden sendiri atau orang-orang yang diragukan independensinya karena masih menjabat sebagai anggota Polri aktif meski hal ini ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas Kompolnas.

Terakhir, mengenai wewenang, tugas, fungsi dan kegiatan dari komisi kepolisian perlu diperluas dan dipertegas sehingga tidak menimbulkan kesan bahwa Kompolnas hanyalah sebuah lembaga “*think tank*” saja. Penambahan fungsi utama Kompolnas dari sekedar lembaga pemberi saran menjadi lembaga yang juga mempunyai fungsi sebagai lembaga pengawasan akan menambah integritas Kompolnas.

## DAFTAR PUSTAKA

Dalam Daftar Pustaka ini disajikan beberapa sumber kepustakaan yang dipergunakan penulis sebagai acuan dalam pembuatan skripsi ini, antara lain :

### A. Buku :

- Ahmad Amin. 1975. *Etika (Ilmu Akhlak)*, Bulan Bintang, Jakarta
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya*, UI Press, Jakarta
- Dahlan Thaib. 2000. *Kedaulatan Rakyat, Konstitusi Dan Negara Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Franz Magnis Suseno.(a) 1989. *Etika Dasar*, Pustaka Filsafat-Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_ (b) 2006. *Etika Abad kedua puluh*, Teks Kunci – Kanisius, Yogyakarta
- Hasan Zaini. Z.1974. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung
- Lay, dan Pratikno. Komnas HAM 1998-2001 : Pergulatan dalam Transisi Politik, ctk. Pertama, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Miriam Budiardjo. 1998. *Menggapai kedaulatan Untuk Rakyat*, Mizan, Bandung
- \_\_\_\_\_ 2001. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moh. Mahfud MD. 1999. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta
- Muhammad Tahir Azhary. 1991. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah Dan Masa Kini*, ,Bulan Bintang, Jakarta

- Ni'matul Huda. 2005. *Negara Hukum, Demokrasi Dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta
- Pudi Rahardi. 2007. *Hukum Kepolisian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Jakarta
- R. Moh. Sjfii Wirakusumah.1958. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante*, Jilid I, Bandung
- Satjipto Rahardjo. 1988. *Polisi Dan Masyarakat Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- S.F.Marbun. (a) 1987. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta
- \_\_\_\_\_ (b) 2003. *Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia*, Edisi Revisi, 2003, UII Press, Yogyakarta
- Sudargo Gautama. 1983. *Pengertian Negara Hukum*, ctk.Pertama, Alumni, Bandung
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, ctk. Ketiga, UI Press, Jakarta: 1986
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*, ctk. Pertama, Bandung, PT. Eresco Jakarta

**B. Jurnal / Makalah :**

Jentera, Edisi 12 Tahun III, April-Juni 2006

Jurnal Hukum No.7 Vol.4, 1997

Tim Pusdiklat Pegawai. 2006. *Bahan Diklat Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat II Meteri Pokok Etika Birokrasi*, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Jakarta

### **C. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia dalam [http: www.kontras.org](http://www.kontras.org)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Komisi Kejaksaan dalam

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 tentang Komisi Yudisial dalam

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com)

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2005 tentang Komisi

Kepolisian Indonesia dalam <http://www.djpp.depkmham.go.id>

### **D. Surat Kabar :**

Republika, Selasa 4 Juni 2006

Suara Merdeka, 1 Juli 2006

Harian Sindo, Selasa 3 Juli 2007

### **C. Data Elektronik :**

Al-alaf, *Komisi Kepolisian, Masyarakat Kecolongan?*, Tempo Interaktif dalam

[www.tempo.com](http://www.tempo.com)

Alexius Tantrajaya, *Kompolnas sudah terbentuk*, dalam <http://www.suarapemb>

[aruan.com](http://www.suarapemb)

*English Dictionary*, dalam [http: //stardict.sf.net](http://stardict.sf.net)]stardict[/url]

*Indonesia Police Review, Independensi Kompolnas* (Vol. I. Num. 2, June 2005)

dalam [http:// www.ridep.or.id](http://www.ridep.or.id)

\_\_\_\_\_, *Pengorganisasian Kompolnas* (Vol. I, No. 2, June 2005)

dalam <http://www.ridep.or.id>

\_\_\_\_\_, *Antara Harapan dan Kenyataan* (Vol. I, No. 2, June 2005)

dalam <http://www.ridep.or.id>

\_\_\_\_\_, *Ketidakwajaran Kompolnas* (Vol. I, No. 3, July 2005)

dalam <http://www.ridep.or.id>

\_\_\_\_\_, *Kepolisian Indonesia sentralisasi atau desentralisasi?*

(Vol. I, No. 3, July 2005) dalam <http://www.ridep.or.id>

Iskatrinah, *Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan*

*Pemerintahan Yang Baik*, <Http://www.yahoo.com/artikel/jurnal>

Depham/23/5/2004

Kompas Online (a) *Polisi Tak Gampang Mendulang Simpati*, dalam <http://www.kompas.com>

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

Krist Kleden, *Potret Citra Polisi Indonesia*, Kompas cyber media, dalam

<http://www.kompas.com>

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia dan Komisi Hukum Nasional,

*Lembaga Pengawas Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu*, 2002,

<http://www.pemantau-peradilan.com>

Novel Ali, *Polisi di Tengah Masyarakat Demokratis*, dalam [www.ridep.or.id](http://www.ridep.or.id)

\_\_\_\_\_, Wawancara dengan Novel Ali (Anggota Kompolnas dan Dosen Fisipol

Universitas Diponegoro Semarang) dalam <http://www.suaramerdeka.com>

Com

\_\_\_\_\_, *Peran Kompolnas*, dalam <http://www.suaramerdeka.com>

Nurcholish Madjid, *Peran Agama Bangun Persatuan Bangsa*, suara merdeka,

Sabtu, 2 Agustus 2003 dalam <http://www.suaramerdeka.com>

Satjipto Rahardjo, *Komisi Kepolisian, Mitra Baru Polri*, Sabtu, 1 Juli 2006 dalam

[www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)

Sri Bintang Pamungkas, *Reformasi Harus Tuntas*, dalam <http://www.seasite.niu.edu/indonesian/Reformasi/Chronicle/Kompas/May27/Sri01.htm>

Tempo Interaktif, *Komisi kepolisian, masyarakat kecolongan?*, dalam

<http://www.tempo.com>

